

**'RESISTENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUKIMAN
ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS JAMBI¹**

Rina Astarika²
Partini³
Endang Sulastri⁴

ABSTRAK

Pemerintah Propinsi Jambi sudah melakukan pemberdayaan terhadap Orang Rimba diberbagai bidang. Pemberdayaan melibatkan semua stakeholder terkait yaitu Pemerintah, Swasta dan LSM. Keberhasilan pemberdayaan di bidang pemukiman belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di TNBD Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung, *focus group discussion*, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa resistensi program pemberdayaan pemukiman Orang Rimba di TNBD Jambi disebabkan karena : 1) pemberdayaan pemukiman tidak mengacu pada karakteristik sosial, ekonomi dan budaya Orang Rimba, atau dapat dikatakan pemberdayaan tidak sesuai dengan sistem ide Orang Rimba tentang konsep rumah dan budaya melangun, 2) pemberdayaan pemukiman tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi Orang Rimba 3) Tidak berjalannya konsep pemukiman PKAT sebagai pranata menyeluruh 4) masih kurangnya kerjasama lintas sektoral dalam pemberdayaan pemukiman bagi Orang Rimba.

Kata kunci: *resistensi, pemberdayaan, pemukiman, orang rimba, TNBD*

ABSTRACT

Jambi Province Government has empowered Rimba people in various fields. The empowerment involves all relevant stakeholders namely Government, Private Sector and NGOs. The success of empowerment in the field of settlement has not been standardized. This study aims to examine the resistance of the settlement empowerment program on Rimba people in Bukit Duabelas National Park of Jambi (BDNP). The research method used was qualitative-descriptive. The research data was obtained through direct observation, focus group discussion, interviews, observation, documentation and literature studies. The results of the study indicate that the resistance of settlement empowerment program of Rimba people in Jambi National Park is due to 1) settlement empowerment does not refer to Rimba people social, economic and cultural characteristics, or it can be said that empowerment is not in accordance with Rimba people system of housing and cultural development concepts. 2) the empowerment of settlements were not accompanied by economic empowerment of Rimba people 3) the failure of the concept of the fostering remote indigenous communities settlement as a comprehensive institution 4) There is still lack of cross-sectorial cooperation in empowering settlements for Rimba people.

Keyword: *resistance, empowerment, settlements, Rimba people- NPBD*

¹ Hasil Penelitian

² Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka, Pos-el: rinaastarikasyafrie@gmail.com

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

⁴ Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

A. PENDAHULUAN

Orang Rimba atau yang dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu etnik tradisional yang ada di Indonesia. Orang Rimba merupakan sebutan bagi komunitas adat yang hidup dalam hutan di Provinsi Jambi. Diawali dengan sebutan suku terasing, yang merupakan generalisasi untuk semua suku yang dianggap “belum hidup normal”. Kemudian mereka dinamai Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan berikutnya disebut Suku Anak Dalam (SAD), sedangkan istilah *Kubu* merupakan sebutan yang dilekatkan oleh masyarakat melayu pada komunitas ini. *Kubu* diartikan hidup liar, kotor, bau, penuh dengan kekuatan *magic*, bodoh dan tertutup. Penyebutan *kubu* ini sangat ditentang oleh Orang Rimba, dan dengan lantang menyebutkan identitas mereka sebagai Orang Rimba (Rangkuti dan Angkawijaya, 2010)

Keseharian mereka diisi dengan aktivitas memanen sejumlah hasil hutan, terutama produk hutan non kayu untuk mempertahankan hidup mereka. Hutan merupakan sumber makanan dan tempat tinggalnya (Hariyadi dan Tictikn, 2012). Pola penghidupan Orang Rimba berburu dan meramu telah ada sejak ribuan tahun dan tetap mereka pertahankan hingga saat ini (Handini, 2006).

Dinamika kehidupan Orang Rimba tidak terlepas dari hutan, dan menjadi permasalahan ketika hutan sebagai ruang hidup mereka terus menerus tereksplorasi dan menjadikan Orang Rimba termarginalkan (Muchlis, 2017). Praktek-praktek pembangunan yang membuat kehancuran hutan hujan tropis di wilayah Bukit Duabelas dimulai era tahun 1970-an ketika rezim orde baru gencar melakukan pembangunan hingga ke pelosok Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada era pemerintahan orde baru, pengusaha kayu mengantongi ijin hak penguasaan hutan (HPH) dari pemerintah secara masif me-

lakukan eksploitasi kayu di kawasan Bukit Duabelas (Rokhdian, 2012).

Berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan harkat derajat dan kehidupan Orang Rimba telah dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan LSM. Orang Rimba dijadikan objek “pembangunan” melalui skema proyek pemukiman kembali (*re-settlement*) dengan pelabelan sebagai Masyarakat Terasing oleh Departemen Sosial. Proyek tersebut dilandasi anggapan bahwa Orang Rimba telah kehilangan kontak dengan arus perubahan (*mainstream*) dari segi sosial, reliqi, politik dan ekonomi, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menolong dan mengembalikan orang rimba kedalam tatanan umum melalui pemberian bantuan rumah dan pemukiman, mengenalkan cara-cara berproduksi, ekspresi budaya baru, pendidikan formal, fasilitas kesehatan, pemberian agama dan interaksi dengan masyarakat lain (Person, 1998).

Pemberdayaan dibidang pemukiman dilakukan oleh Kementrian Sosial Melalui program pembinaan komunitas adat terpencil (PKAT), awalnya program ini bernama PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing). Dalam kurun waktu 2010-2015, program pemberdayaan pemukiman terhadap Orang Rimba di TNBD telah dilaksanakan di beberapa lokasi antara lain: a) Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari (tahun 2011); b) Desa Bukit Suban dan Pematang Kabau Kecamatan, Kabupaten Sarolangun (tahun 2013); c) Sebelum itu juga banyak pemukiman untuk Orang Rimba sudah didirikan yakni di desa Singosari pada tahun 2007 sebanyak 30 rumah, di dusun Air panas tahun 1991 sebanyak 50 rumah. Kepada masing masing KK (Kepala keluarga) diberikan rumah yang berukuran 6x6 meter, berdinding papan, beratap seng dan berlantai tanah (Muchlis, 2017).

Bagaimana tanggapan Orang Rimba terhadap program ini?. Beragam respon

Orang Rimba muncul. Di Desa Sepintun Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sudah dibangun puluhan rumah. Namun rumah-rumah itu banyak yang dijual pada pendatang (warga trans), hanya sebagian Orang Rimba yang tinggal disana. Di Kabupaten Batanghari, pemerintah juga sudah membangun 55 rumah untuk rombongan Tumenggung Celitai. Pemerintah menjanjikan membangun sekolah, puskesmas dan lahan usaha. Lima tahun sudah berlalu, namun sarana yang dijanjikan tak kunjung datang dibangun. Nasib pun sama, banyak rumah terlantar, rusak dan ditinggalkan penghuninya (www.mongobay.co.id). Beberapa berita yang diunggah media online dari tahun 1999-2017 memberitakan kegagalan program pemberdayaan Orang Rimba di TNBD tersaji pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Berita Media Online tentang Kegagalan Program Pemberdayaan Orang Rimba di TNBD pada Tahun 2009-2017

No	Judul	Media
1	Impian Memandirikan Orang Rimba	Arsipgatra.com (Tahun 2009)
2	Taman Nasional Bukit Dua Belas di Jambi terancam punah	www.tribunnews.com (23 September 2013)
3	Orang Rimba Jambi Kesulitan Mendapat Pangan	www.antaraneews.com (7 Maret 2015)
4	Hutan Menyempit Orang Rimba Menurun	Newsliputan6.com (8 Maret 2015)
5	Bertemu Jokowi, Ini Kata Suku Anak Dalam (SAD)	https://m.tempo.com (31 Oktober 2015)
6	Merumahkan Orang Rimba	Pindai.org. (18 November 2015)
7	Orang Rimba Diusir dari tempat Tinggalnya, Dimana Kehadiran Negara ?	News.idntimes.com (14 Oktober 2016)
8	LIPI diskusi Orang Rimba di STISIP NH	Jambitribunnews.com (17 Oktober 2016)
9	Merefleksi Pemukiman Orang Rimba	Jambipos.online.com (30 Januari 2017)
10	Ketika Semua Berlomba Memberdayakan Orang Rimba	www.antaraneews.com (30 Januari 2017)

Sumber : Pengolahan data primer penelitian

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di TNBD. Istilah resistensi mengacu pada posisi sikap untuk bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Dalam kaitanya dengan penelitian ini resistensi diartikan sebagai suatu tindakan menolak program pember-

dayaan pemukiman di kawasan TNBD. Tindakan sosial antisipatif dilakukan Orang Rimba karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penguasa terhadap dirinya, baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Penelitian difokuskan pada program pemberdayaan pemukiman yang dilakukan oleh *Pemerintah* dengan pertimbangan bahwa program pemberdayaan Pemerintah lebih terstruktur dari segi pendanaan dan fasilitasi serta dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan model pendekatan kualitatif, karena data dan informasi yang dibahas bersifat unik dan khas serta merupakan gejala sosial dalam konteks pemberdayaan dan resistensi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tertulis yang berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, buku, tesis, disertasi dan berbagai informasi secara online.

Penelitian ini difokuskan pada *Orang Rimba Air Hitam* dan *Orang Rimba Makekal Ulu* yang mendiami Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi. *Orang Rimba Air Hitam* pada awalnya menerima program pemukiman yang diberikan pemerintah, namun seiring berjalan waktu mereka meninggalkan perumahan yang dibangun pemerintah, bahkan ada yang menjual rumah tersebut pada warga transmigrasi sekitarnya. Sedangkan *Orang Rimba Makekal Ulu* adalah tipe masyarakat Rimba yang memang dari awal menolak pemukiman yang diberikan Pemerintah.

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi perilaku Orang Rimba dan konsepsi pemukiman menurut budaya mereka. Informan dipilih dengan cara *purposive* dan *snowball sampling*. Data didapatkan melalui, *focus group discussion*, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Rumah bagi Orang Rimba

Rumah mempunyai makna lebih dari sekedar tempat tinggal. Rumah berfungsi sebagai tempat manusia berkeluarga atau bereproduksi, bersosialisasi, *storage* (tempat penyimpanan) dan sebagai wahana manusia mengekspresikan dirinya, sehingga menjadi sangat penting mengenal pola penataan ruang rumah, untuk mengetahui pola pikir manusia penghuninya (Prasetyo, 2013).

Orang Rimba selama ratusan tahun hidup di dalam hutan belantara Sumatera. Mereka hidup berkelompok kecil dan menyebar pada daerah-daerah yang dianggap strategis. Strategis dalam artian ditemukan banyak sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara konseptual mereka menganggap hutan adalah rumah dan tempat tinggal mereka sesungguhnya. Secara garis besar Orang Rimba dikelompokkan atas tiga rombongan besar, yaitu *rombong Air Hitam*, *rombong MakekalUlu* dan *rombong Kejasung* (Sandbukt dan Warsi, 1998). Walaupun terbagi atas rombongan yang berbeda, namun konsep pemukiman dan kebudayaan mereka tetap sama.

Rumah bagi Orang Rimba disebut *bubungan*, *teratak* atau *pesaken* (Handini, 2006). Berdasarkan bentuknya rumah terbagi atas dua yaitu *rumah godong* (rumah besar) dan *rumah sampaeyon* (rumah tadah angin). Berdasarkan fungsinya rumah juga dikategorikan menjadi dua yaitu *sudung* (rumah sementara yang mudah di lepas dan dibawa pindah, dan *rumah untuk menetap*. *Sudung* digunakan bila *besanding* atau *melangun*. *Besanding* bila mereka bermalam ditempat lain yang agak jauh dari tempat tinggal mereka karena berburu. *Melangun* bila ada keluarga yang meninggal maka mereka akan pergi meninggalkan rumah mereka. Tempat untuk *sudung* dan *melangun* dipilih tempat yang agak miring dan dekat dengan sumber air. Lantai *rumah sudung* diatur miring, dengan tujuan untuk menjaga diri dari gangguan binatang berbisa.

Adapun konsep rumah menetap bagi Orang Rimba berarti mereka mendiami bubungan lebih dari dua musim dalam setahun untuk tempat tinggal keluarga inti ataupun keluarga luas (Soetomo, 1995). Bubungan menetap tersusun atas tiga bagian, yaitu rumah induk, *gajah nyusu* dan bagian dapur. Bagian inti rumah terdiri atas rumah induk dan *gajah nyusu*, dan bagian bukan inti adalah dapur. Rumah induk dihuni oleh keluarga inti yang terdiri atas suami, isteri, anak perempuan yang sudah besar dan anak bujang yang sudah besar. Bubungan *gajah nyusu*, tersambung dengan rumah induk digunakan untuk tempat menaruh air, kual, periuk, hasil buruan dan perobat dapur lainnya.

Bahan yang dipakai untuk membuat bubungan berupa bahan yang ada di sekitar pemukiman mereka, tidak mengambil barang dari luar. Atapnya terbuat dari daun nipah atau *bengkuang* (semacam pandan), yang cara membuatnya dengan menganyam. Di atas dedaunan ditaruh pemberat yang berupa kayu-kayu kecil, kemudian diikat pada kerangka rumah. Dindingnya terbuat dari kulit kayu meranti, tiang, alang panjang, alang pendek, gelagar, tangga terbuat dari kayu bulat dari sekitar mereka. Cara merangkainya tidak ada yang menggunakan paku, melainkan dengan cara diikat memakai rotan cacing. Paku, seng, papan, dan kayu. Gergajian tidak dipakai karena merupakan larangan nenek moyang. Pemakaian paku, seng, genteng, bata dan papan, dan kayu persegi menandakan berkampung dan berarti melanggar adat yang akan kena kutuk arwah nenek moyang (Soetomo, 1995). Bubungan *rumah sudung* dan rumah untuk menetap dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini :



Gambar 1. Rumah Sudung (sementara)
(Dokumen penelitian 2018)



Gambar 2. Rumah Godong (menetap)
(Dokumen penelitian 2018)

Sebenarnya tidak ada aturan baku secara ketat dalam hukum adat yang mengatur penempatan rumah Orang Rimba. Tetapi ada aturan yang mesti diikuti oleh pembuatnya. Seperti harus ada pembagian ruang antara laki laki dan perempuan. Penempatan lokasi rumah sebaiknya menjauhi daerah yang dipantang, seperti *daerah suban* atau rawa. Daerah yang menurut mereka dihuni oleh dewa jahat, karena takut akan kutukan, maka harus mereka jauhi (Prasetijo, 2013)

1. Program Pemberdayaan Pemukiman di Jambi

Menurut Rinaldi (2013) jumlah KAT di Jambi belum bisa terdata seutuhnya, dikarenakan lokasi yang sulit dijangkau dan kebudayaan melangun (berpindah) Orang Rimba yang menyebabkan sulitnya pendataan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Jambi, jumlah keseluruhan KAT di Propinsi Jambi dari tahun 1973 sampai tahun 2013 sebanyak 6.773 KK/ 28.883 jiwa. Dari data tersebut ada 3.299 KK/ 13.664 jiwa yang sudah diberdayakan melalui program PKAT dan sekitar 3.544 KK/15.239 jiwa KAT yang belum

mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan KAT di Jambi masih menjadi prioritas utama pemerintah.

Melalui Keppres Nomor 111 tahun 1999 tentang Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yang dimaksud dengan KAT (komunitas adat terpencil) atau masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik, Mereka dianggap sebagai suatu permasalahan sosial karena keterasingan dan keterbelakangannya, yang membuat mereka rawan secara sosial. Untuk mengatasi permasalahan sosial ini maka negara membuat program PKAT untuk mereka (Muchlis, 2017). Strategi pemberdayaan KAT dilakukan melalui *sistem pemukiman sosial* dalam bentuk pemukiman di tempat asal (*in-situ*) dan pemukiman di tempat baru (*exitu*), membangun sarana dan prasarana sosial, serta mengembangkan kerjasama antar dinas terkait dan masyarakat (Dinas Sosial Provinsi Jambi, 2013).

Tujuan utama dari penanganan masyarakat terasing adalah dengan cara memukimkan mereka kedalam sebuah pemukiman yang didesain khusus untuk itu dan membina mereka di tempat tersebut. Landasan utama dari kegiatan pemukiman dan pembinaan terhadap masyarakat terasing adalah untuk meniadakan keterbatasan komunikasi dengan masyarakat lain dan terhadap pelayanan pemerintah.

Bentuk bantuan program pemukiman yang diberikan kepada KAT adalah masing-masing kepala keluarga (KK) KAT diberikan rumah ukuran type 36, berdinding papan, beratap seng dan berlantai semen, dibuatkan juga pembangunan fasilitas balai, pembangunan sarana air dan jalan lingkungan. Ada juga pemberian jaminan hidup untuk warga selama 8 bulan dalam bentuk paket jatah hidup (Jadup), bantuan peralatan kerja dan pemberian bibit tanam pa-

lawija dan pupuk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat (Dinas Sosial Prop Jambi, 2013).

Dalam kurun waktu 1991 sampai tahun 2015, data program pemberdayaan pemukiman pada Orang Rimba Air Hitam di TNBD dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabell. Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba Air Hitam Di TNBD Jambi

Bidang	Sumber Program	Pelaksana Program	Bentuk Pemberdayaan Pemberdayaan
Perumahan	Pemerintah Pusat dan daerah	Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial di Kab. Sarolangun	Tahun 1991 dibangun 50 rumah di dusun Air panas Tahun 2007 dibangun 30 rumah di dusun Singosari Tahun 2008 di Dusun Singosaridibangun 20 rumah Tahun 2013 dibangun 50 rumah Desa Ujung Kutai, Pematang Kabau Tahun 2013, di desa Bukit Suban sebanyak 61 rumah untuk 61 KK (daerah panti kayu 1). Tahun 2015 dibangun 20 Rumah Di desa Panti Kayu 2 Kecamatan Air Hitam. Disediakan pendamping lokal yaitu pak kades setempat dan juga pedamping professional selama kurang lebih setahun untuk menetap dan tinggal bersama Orang Rimba.

Sumber : Data Primer, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 1991 sampai tahun 2013 di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Pemerintah sudah membangun pemukiman sebanyak 231 rumah untuk Orang Rimba. Program pemukiman mengeluarkan dana yang tidak sedikit, karena itu perlu dilakukan pertimbangan dan evaluasi untuk pengembangan program pemukiman ini selanjutnya. Muncul pertanyaan, “apakah penanganan masyarakat terasing itu memang hanya dengan harus memukimkan Orang Rimba? Kalau tujuan dari penanganan masyarakat terasing dilakukan dengan memukimkan mereka sebagai kegiatan utamanya,

maka tujuan dari penanganan masyarakat terasing dapat menyimpang dari tujuan yang seharusnya dicapai. Karena kegiatan memukimkan sekelompok orang dengan tradisi kebudayaan yang telah mantap seperti pada Orang Rimba akan menghasilkan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik dan bahkan kepribadian.

2. Rumah Bagi Orang Rimba Air Hitam Gagal Berulang Kali, Mengapa?

Model pemukiman Orang Rimba sebetulnya dapat dilihat sebagai sebuah prana-nata menyeluruh atau institusi lokal, karena Orang Rimba dibina dan diperlakukan sebagai sebuah masyarakat kecil di dalam kelompok. Orang Rimba menerima dan mengikuti program-program pembinaan dari PKAT. Di pemukiman tersebut seharusnya tinggal pendamping PKAT yang selalu siap mendampingi mereka. Pola ini sebenarnya dapat menjadi efektif untuk usaha pembinaan Orang Rimba seandainya dilakukan sesuai aturannya. Namun pada Kenyataannya tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Berbagai kritikan terhadap program pemukiman terjadi, seperti yang dilakukan Tumenggung Bt (Kelompok Singosari) Air Hitam. Orang Rimba dikelompoknya sempat menolak program pemukiman, karena berdasarkan pengalaman, bantuan yang sama pada tahun 2007, rumah yang dibangun pemerintah banyak yang roboh, karena material yang asal-asalan. Mereka juga berujar lebih baik diberi *terpal* agar bisa dibawa *melangun* (berpindah) untuk *susudungon* (*atap rumah dari terpal*). Tetapi oleh petugas dijanjikan rumah semi permanen, akhirnya mereka setuju. Faktanya begitu perumahan diberikan tidak lebih baik dari bangunan rumah sebelumnya. Alhasil dari 55 rumah yang dibagikan 27 KK diantaranya sudah keluar dari rumahnya. Mereka berkeliaran di sekitar TNBD. Rumah yang dibangun tidak ada fasilitas MCK, tidak ada fasilitas sumur, listrik dan jauh dari tempat mereka mencari nafkah (Muchlis, 2017). Wawancara dengan

Informan US (Dinas Sosial Propinsi Jambi) mengatakan:

“Dalam bantuan program pemukiman yang diberikan, Tidak bisa semua langsung diberikan namun secara bertahap karena keterbatasan dana. Misalnya tahun ini dibuat rumah dan sumur dulu, tahun depan baru MCK nya. (Wawancara, Oktober 2017).

Orang Rimba Air Hitam khususnya di desa Pematang Kabau dan Bukit Suban, menempati rumah pada hari kamis malam (karena hari jumat adalah hari pasar) Mereka datang dengan membawa hasil hutan seperti rotan, karet, madu dan menjualnya di hari pasar. Kondisi rumah selama enam (6) hari ke depan kembali kosong. Rumah bantuan dari pemerintah hanya berfungsi sebagai rumah singgah. Ketika aktivitas di pasar selesai maka kelompok masyarakat ini akan kembali ke pemukiman mereka di hutan (Muchlis, 2017)

Perumahan Orang Rimba Air Hitam di Desa Pematang Kabau dan Bukit Suban sebagaimana disajikan pada gambar 3 berikut ini :



Gambar 3 & 4. Program Pemukiman KAT Orang Rimba Air Hitam, (Sumber Dokumen Penelitian 2018)

Gambar 3 menunjukkan bahwa struktur bangunan rumah Orang Rimba yang dibangun beratap seng, berdinding beton, dan berlantai semen, serta jarak pemukiman Orang Rimba antara rumah yang satu dengan rumah yang lain sangat dekat berkisar 1 sampai 2 meter. Tidak ada lahan untuk pekarangan, apalagi untuk berusaha tani. Hal ini menyebabkan banyak Orang Rimba meninggalkan pemukiman yang mereka dapatkan.

Pendapat ini di dukung oleh Feri Irawan (2015) yang mengatakan, “belum ada program pemukiman orang Rimba yang dibangun pemerintah berhasil. “Buyar semua!”. Kegagalan tentu bukan tanpa sebab. Menurut Feri, pemerintah tak berpikir, bagaimana orang Rimba yang biasa hidup nomaden dan berburu bisa mencukupi kebutuhan hidup, saat mereka dipaksa menetap. Pemerintah hanya membangun rumah tanpa lahan usaha yang cukup. Orang Rimba yang hidup menetap meninggalkan budaya dan kepercayaan mereka. Merumahkan orang Rimba tak bisa hanya dengan membangun rumah. Orang Rimba perlu ladang sumber hidup.

Bantuan berbentuk fisik dengan tujuan merumahkan Orang Rimba, namun tidak memberikan lahan usaha, menyebabkan program ini dinilai suram oleh Orang Rimba karena tidak menjamin kehidupan mereka. Pendapat senada juga dikatakan Ferry (2016) yang menyatakan banyak pemukiman Orang Rimba ditinggalkan karena tidak ada transformasi bagaimana Orang Rimba harus bertahan hidup. Kondisi ini menyebabkan Orang Rimba tak mampu bersaing dan tergusur dari segi ekonomi. Aritonang (2010) juga mengatakan hal yang sama, “Kegagalan pemukiman disebabkan Orang Rimba terbiasa hidup secara nomaden.” Selain itu rumah yang dibangun Pemerintah jauh dari hutan dan sumber air. Sebagian besar Orang Rimba menolak dan meninggalkan rumah tersebut. Kendati ada yang menerima, jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ironisnya be-

berapa bantuan rumah dari Pemerintah dijual oleh Orang Rimba kepada penduduk desa atau warga transmigrasi, sebelum akhirnya mereka masuk kembali kedalam hutan (Muchlis, 2017).

Kegagalan juga disebabkan karena perbedaan konsep rumah dan pemukiman sebagaimana yang dianut oleh Orang Rimba selama ini. Orang Rimba membangun rumah dengan konsep yang sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rumah atau sudung dibangun disepanjang anak sungai dan berada tidak terlalu jauh dari sungai. Hal ini seperti yang di katakan oleh Informan TG (Air Hitam) berkata:

“Orang Rimba, punyo selako adat, dalam membangun rumah yaitu rumah (sundang) beratap sikai, badinding banir, balantai tanah dan berkelambu resam”
Artinya: Mereka (Orang Rimba) mempunyai larangan dalam membangun rumah, pantang beratap seng, harus berinding kayu, harus berumah beratap daun kayu hutan, dan berlantai tanah”.

Begitu sulitnya bagi Orang Rimba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Rumah yang diberikan pemerintah terbuat dari semen, beratap seng, dan hanya ada ruang tidur dan masak. Orang Rimba biasa hidup beralaskan tanah dan berinding kayu. Mereka membuang sampah rumah tangganya di lantai tanah, dan di sana juga lah mereka tidur (Prasetijo, 2008).

Ada satu aksioma bagi pemerintah, tidak mungkin melakukan program lain sebelum Orang Rimba dapat didiamkan dalam satu lokasi. Asumsi ini timbul karena kurangnya pemahaman makna melangun dan sifat mobilitas Orang Rimba (Aritonang, 2010). Disisi lain Pemerintah memandang faktor budaya yang Orang Rimba miliki dan masih dilakukan hingga kini yaitu *melangun* merupakan penghambat utama atas kegagalan program pemberdayaan pemukiman. “Sulit sekali menghilangkan budaya nomaden, sulit berubah”, kata Usuf Suryana, Kepala Seksi Pemberdayaan

AKT, Dinas Sosial Jambi. Beliau membenarkan banyak program perumahan gagal tetapi Usup menuding penyebabnya pemerintah kabupaten tidak konsisten meneruskan program pemerintah pusat. Banyak dinas tidak mau ikut andil, mereka hanya mengandalkan Dinas Sosial. Ada ego sektoral. Menurut mereka Orang Rimba itu urusan Dinas Sosial jadi mereka tak perlu ikut tanggung jawab. (www.mongobay.com)

Dalam pemberdayaan pemukiman, pemerintah tidak menghargai pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang ada tentang bentuk rumah dan kebudayaan melangun Orang Rimba. Pengetahuan lokal mereka, terabaikan. Pembangunan yang menekankan pada ekonomi telah meminggirkan masyarakat lokal. Hal yang sama juga dikatakan Lestari (2012) yang mengatakan, pemberdayaan dengan penyediaan rumah bagi Orang rimba telah gagal, walaupun pada awalnya mereka menerima namun pada akhirnya mereka meninggalkan pemukiman tersebut. Semua itu disebabkan pemberdayaan pemukiman tidak memperhatikan adat atau budaya orang Rimba itu sendiri.

Program pemukiman dengan mengeluarkan Orang Rimba dari hutan, yang dilakukan oleh negara, dengan menganggap komunitas ini bisa segera beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan mampu melakukan aktivitas perekonomian yang sama seperti warga transmigrasi seperti berladang, beternak, menghasilkan uang dan membeli segala kebutuhan hidupnya terbukti gagal. Orang Rimba terbiasa dengan kehidupan di dalam hutan, tidak serta merta bisa dipisahkan dengan alam dengan cara-cara modern sebagaimana yang dilakukan komunitas lain.

3. Penolakan Pemukiman Orang Rimba di Makekal Ulu

Tawaran perumahan untuk pemukiman di Makekal Ulu, datang pada dekade tahun 1980-an. Tetapi kelompok Tumenggung celitai (Makekal Ulu) menolak keluar dari kawasan hutan adat di Bukit Duabelas. Berdasarkan wawancara dari Informan TC

(Makekal Ulu, April 2018) mengatakan bahwa: *“hopi rumah dibangun di luar hutan”* (artinya tidak mau rumah dibangun di luar hutan). Orang Rimba Makekal Ulu tidak mau menerima bantuan rumah yang dibangun di luar hutan mereka.

Informan MT juga mengatakan dalam adat Orang Rimba, menerima dirumahkan sama artinya memilih untuk meninggalkan adat. Petikan wawancara dengan Informan MT sebagai berikut :

“Kalau kelompok Orang Rimba terima rumah, artinya budaya hutan tanah kito, kito buang tidak digunakan lagi. Orang Rimba itu sudah punya rumah, untuk apa rumah, rumahnya ya Bukit Duabelas. Masyarakat adat harus berpegang teguh pada adat dan menjaga wilayah adatnya. Beberapa Tumenggung dianggap gegabah dengan menerima rumah dari pemerintah. MT mengatakan akan bahaya jika semua kelompok menerima bantuan untuk dirumahkan. Ia takut pemerintah sengaja ingin mengosongkan Bukit duabelas dengan cara membangun perumahan di luar kawasan adat Orang Rimba”.

MT juga mengatakan:

“Orang Rimba Makekal Ulu memiliki banyak kebun karet. Kebun karet sudah cukup, tapi dak ado hasilnya”? Karena dimanfaatkan tengkulak, pemerintah belum turun tangan, harga getah dak jelas, jalan dak ado. Kalau pemerintah pusat turun malah programnya bangun rumah, apo Orang Rimba bisa makan rumah? Orang Rimba tidak bisa makan rumah jawab MT kesal (Wawancara, April 2018).

Menurut MT Orang Rimba yang hidup di perumahan akan sengsara dua kali, dibanding dengan kelompok yang tinggal dalam kawasan. Mereka yang hanya bisa hidup bercocok tanam dan berburu di paksa hidup di luar hutan dengan pengetahuan yang terbatas. Akibatnya banyak Orang Rimba jadi pengangguran meski hidup dalam kemoderenan. Punya motor tapi tak

punya penghasilan. Akhirnya banyak kasus pencurian brondol sawit, atau minta-minta (pengemis). Kasus ini paling banyak terjadi pada Orang Rimba yang menerima bantuan perumahan.

Prasetijo (2013) menyatakan bahwa Orang Rimba mempunyai cara bertahan yang unik dengan budayanya. Pemerintah harus memfasilitasi Orang Rimba yang ingin berubah dan Orang Rimba yang ingin mempertahankan adatnya. Yang terpenting dalam program pemukiman adalah mengakomodir budaya Orang Rimba. Selama ini Pemerintah sibuk membangun pemukiman, tetapi mengabaikan sumber penghidupan dan budaya Orang Rimba

4. Solusi Mengatasi Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman

Agar program pemberdayaan pemukiman dapat diterima masyarakat Rimba, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain :

- a. Pendekatan pemberdayaan pemukiman yang digunakan *bottom-up* (berasal dari masyarakat Rimba itu sendiri) mengacu pada karakteristik sosial, ekonomi dan budaya Orang Rimba atau sesuai dengan sistem ide Orang Rimba. Selama ini pendekatan pemberdayaan pemukiman dikatakan sudah bersifat *bottom-up*, namun kenyataan di lapangan masih bersifat *top-down*.
- b. Masalah utama yang dihadapi Orang Rimba bukanlah soal pemukiman, karena rumah bagi mereka adalah hutan. Masalah Orang Rimba yang utama adalah *sumber penghidupan* yang semakin sulit. Prioritas strategi pemberdayaan ekonomi Orang Rimba lebih mengacu pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan pengembangan usaha kreatif di bidang pertanian dan non pertanian.
- c. Adanya kerjasama dan keterlibatan semua aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat untuk bersama sama memberdayakan Orang Rimba.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum resistensi program pemberdayaan pemukiman Orang Rimba di TNBD Jambi disebabkan karena ketidaksamaan persepsi Orang Rimba terhadap program pemberdayaan pemukiman. Pengabaian terhadap budaya dan adat lokal Orang Rimba, tidak adanya pemberdayaan ekonomi, tidak berjalannya program PKAT secara maksimal serta tidak adanya pembinaan lintas sektoral mendasari penyebab terjadinya resistensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang R., 2010. *Orang Rimba Menantang Zaman*. Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.
- Anonim. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT*. Dinas Sosial Propinsi Jambi
- Fery, I.2015. *Rumah Bagi Orang Rimba Gagal Berulang Kali, Mengapa ?* www. mongobay.com, diakses tanggal 1 Oktober 2018.
- Ferry Y. 2016. *Sejarah Pembinaan Terhadap SAD di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi 1970-2014*. scholar.unand.ac.id/13286/ (diakses tanggal 5 Agustus 2017).
- Handini., R. 2006. *Foraging yang Memudar, Suku Anak Dalam di Tengah Perubahan*. Jakarta: Insist Press.
- Hariyadi, N., and T.Ticktin. 2012. *From Shifting Cultivation to Cinnamon Agroforestry: Changing Agricultural Practises Among The Serampasin the Kerinci Seblat National Park, Indonesia*. Human Ecology DOI 10.1007/s10745-012-9481-8
- Lestari, I. 2012. *Penolakan dan Penerimaan Orang Rimba Terhadap Program Pembebrdayaan Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus: Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi*. Skripsi. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang
- Muchlis, Fuad. 2017. *Praktik Komunikasi dalam Pemberdayaan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Propinsi Jambi*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB.
- Person, Gerard. 1989. *The Kubu and the Outside Wold (South Sumatera, Indonesia): The Modification of Hunting and Gathering*” dalam *Anthropas* 84: hal 507-519.
- Prasetijo, Adi, S. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa; Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Wedatama Widya Sastra.
- Rangkuti Rafii dan Angkawijaya Bubeng. 2013. *Mengenal Orang Rimba. Catatan Pendampingan Orang Rimba Menentang Zona*. Jakarta: KKI Warsi.
- Rokhdian, Dodi., 2012. “*Alim Rajo Disembah, Piado Rajo Disanggah. Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi*”. Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia, Bandung. <http://lib.ui.ac.id/> (diakses 5 Agustus 2017)
- Rinaldi, A, 2013. *Upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Suku Anak Dalam Jambi*. Internet. Diakses 04-12-2016. Tersedia pada: <http://kerincitime.co.id/upaya> pembinaan dan pemberdayaan suku anak dalam jambi/html
- Sandbukt, Oyvind dan Warsi. 1998. *Orang Rimba Penilaian Kebutuhan Bagi Pembangunan dan Keselamatan Sumberdaya*. Laporan untuk Bank Dunia. Jambi: Warsi.
- Soetomo, M. 1995. *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Ter-asing di Makekal. Provinsi Jambi*. Disertasi. Universitas Padjajaran.
- Wawancara dengan Bapak Usuf Suryana, Dinas Sosial Propinsi Jambi, Oktober 2017
- Wawancara dengan Tumenggung Grib Air Hitam, Februari 2018

Wawancara dengan Tumenggung Celitai,
April 2018

Wawancara dengan Mijak Tampung, April
2018